

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI KETELADANAN NASIONAL DAN KELUARGA

Oleh:
Santoso Tri Raharjo¹

Email:
santosotriraharjo@gmail.com

ABSTRAK

Keteladanaan yang baik menjadi sesuatu yang sangat langka bagi bangsa ini, sehingga ini lah yang menjadi salah penyebab bangsa ini kehilangan jati dirinya. Keluarga yang merupakan cikal-bakal segala sesuatu yang 'baik' bagi bangsa ini, saat ini mulai tergerus perkembangan jaman, sehingga lebih mengedepankan nilai-nilai 'kebendaan' (material), sehingga tidak jarang prestasi anak bangsa diukur dengan ukuran-ukuran keduniawian. Sehingga 'keluarga' juga melahirkan hal-hal yang kurang baik bagi anak bangsa ini, jika hanya mengukur segala sesuatu keberhasilan berdasarkan kebendaan semata. Lebih jauh lagi persoalan pembangunan nasional dan karakter bangsa ini sesungguhnya dapat ditelusuri bagaimana masyarakat bangsa ini memahami dan menghargai suatu keluarga. Sehingga tidak salah apabila keluarga merupakan pusat dari persoalan (sumber dan sekaligus akibat) dan sekaligus merupakan sumber dari segala penyelesaian bangsa ini. Ide pembangunan karakter dan bangsa (*nation and character building*) dapat mulai lingkungan terkecil dari masyarakat yaitu keluarga.

Kata kunci: keluarga, ketauladanan, pembangunan karakter bangsa

¹ Lektor Kepala dan Koordinator Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD periode 2014-2018.

A. Gagasan *Nation and Character Building*

Presiden Sukarno pernah mengemukakan bahwa kemerdekaan adalah “jembatan emas” menuju cita-cita demokrasi, sedangkan pembentukan “*nation and character building*” dilakukan di dalam prosesnya. Kalau pada saat itu Sukarno menyatakan bahwa, “revolusi belum selesai,” maka dalam konteks “*nation and character building*,” pernyataan demikian dapat dipahami. Dalam arti, baik “*nation*” maupun “*character*” yang dikehendaki sebagai bangsa merdeka belum mencapai standar yang dibutuhkan. Maka dalam hubungan “*nation and character building*” seperti yang diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang terkandung di dalam gagasan awalnya (Otho H. Hadi)²;

- *Pertama, Kemandirian (self-reliance)*, atau menurut istilah Presiden Soekarno adalah “**Berdikari**” (berdiri di atas kaki sendiri). Dalam konteks aktual saat ini, kemandirian diharapkan terwujud dalam percaya akan kemampuan manusia dan penyelenggaraan Republik Indonesia dalam mengatasi krisis-krisis yang dihadapinya. Krisis bahan pangan dan krisis energi merupakan salah satu contoh yang

sedang dialami saat ini sebagai ujian kemandirian bangsa Indonesia.

- *Kedua, Demokrasi (democracy)*, atau kedaulatan rakyat sebagai ganti sistem kolonialis. Masyarakat demokratis yang ingin dicapai adalah sebagai pengganti dari masyarakat warisan yang feodalistik. Masyarakat di mana setiap anggota ikut serta dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingannya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Pemilihan kepala daerah yang sebelumnya telah berjalan dipilih secara langsung oleh rakyat, telah coba dikembalikan lagi pada pola lama dengan dipilih melalui perwakilan (melalui anggota DPRD) juga merupakan ujian akan demokrasi bangsa Indonesia saat ini.
- *Ketiga, Persatuan Nasional (national unity)*. Dalam konteks aktual dewasa ini diwujudkan dengan kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi nasional antar berbagai kelompok yang pernah bertikai ataupun terhadap kelompok yang telah mengalami diskriminasi selama ini. Rasa persatuan nasional sebagai bangsa Indonesia yang satu, kembali diuji terutama setelah pesta demokrasi Pemilihan Presiden 2014. Siap menerima kekalahan dan siap

² Silakan cermati tulisan Otho H. Hadi, Staf Direktorat Politik, Komunikasi, dan Informasi Bappenas, dalam tulisannya tentang *Nation and Caracter Building* melalui *Pemahaman Wawasan Kebangsaan*.

menerima kemenangan dengan merangkul yang pihak kalah demi rasa persatuan Indonesia.

- *Keempat, Martabat Internasional (bargaining positions).* Indonesia tidak perlu mengorbankan martabat dan kedaulatannya sebagai bangsa yang merdeka untuk mendapatkan prestise, pengakuan dan wibawa di dunia internasional. Sikap menentang hegemoni suatu bangsa atas bangsa lainnya adalah sikap yang mendasari ide dasar “*nation and character building*.” Bung Karno menentang segala bentuk “**penghisapan suatu bangsa terhadap bangsa lain,**” serta menentang segala bentuk “**neokolonialisme**” dan “**neoimperialisme.**” Indonesia harus berani mengatakan “tidak” terhadap tekanan-tekanan politik yang tidak sesuai dengan “kepentingan nasional” dan “rasa keadilan” sebagai bangsa merdeka.

Patut diduga bahwa berbagai fenomena sosial yang mengarah menjadi masalah sosial yang muncul dewasa ini merupakan akibat dari lemahnya nilai-nilai kebangsaan (*nation*) serta lemahnya karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa Indonesia. Sebagaimana telah disinyalir oleh Prof Dedy Mulyana dengan menyatakan, bahwa banyak nama-nama rumah makan /restoran dan menjual jenis

makanan-minuman dengan menggunakan nama-nama berbahasa asing, daripada bahasa Indonesia. Mereka lebih bangga, lebih senang, dan lebih percaya diri apabila menggunakan nama-nama berbahasa asing daripada berbahasa Indonesia atau nama-nama lokal. Sementara itu sebaliknya, warga negara asing (WNA) sangat mengagumi dan menyukai jenis makanan Indonesia dan mengagumi kekhasan budaya Indonesia. Sungguh sangat ironis.

B. Masalah Sosial: Lemahnya Karakter Kebangsaan

Terkait dengan isu *nation and character building*; Holil Soelaiman (1993)³ telah mensinyalir kecenderungan permasalahan sosial di Indonesia, yang dimulai dengan runtuhnya nilai-nilai dasar kemasyarakatan, nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya menjadi penopang nilai-nilai dasar *nation and character building*. Beberapa kecenderungan tersebut, yaitu:

1. Semakin melemahnya nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial seperti kemanusiaan, kasih sayang terhadap sesama, kekeluargaan, kegotong-royongan, pengabdian, solidaritas sosial, kepekaan sosial, dan kepedulian sosial; tergeser oleh nilai-nilai baru seperti ke-aku-an, kebendaan (material), keserakahan,

³ Dalam Budhi Wibhawa, dkk (2010, 2015). Dasar-dasar Pekerjaan Sosial. Widya Padjadjaran:Bandung

- keduniawian, efisiensi, dan persaingan serta konflik.
2. Meningkatnya jumlah penyandang berbagai kecacatan (fisik dan mental) baik sebagai sertaan pertumbuhan penduduk maupun sebagai akibat dari pelecehan lalu lintas, kecelakaan kerja, serta gangguan mental akibat ketegangan jiwa.
 3. Meningkatnya permasalahan ketelantaran (terutama psikis dan sosial) anak yang disebabkan semakin meningkatnya keterlibatan kerja (*labour participation*) pria dan terutama perempuan dalam pekerjaan di luar rumah tangga, serta kepemimpinan dalam masyarakat.
 4. Meningkatnya jumlah penyandang permasalahan tuna sosial dan penyimpangan perilaku, sebagai sertaan dari peningkatan arus wisatawan, sebagai akibat dari perubahan gaya hidup, urbanisasi, dan globalisasi.
 5. Meningkatnya jumlah dan proporsi kelompok usia lanjut, yang disebabkan oleh transisi demografik serta semakin tingginya rata-rata harapan hidup; yang berpadu dengan memudarnya nilai-nilai kekeluargaan serta meningkatnya tuntutan kegiatan, yang mengakibatkan keterlantaran penduduk usia lanjut.
 6. Timbulnya akibat sampingan yang tidak diharapkan dari proses dan

keberhasilan pembangunan seperti peluberan biaya sosial (*social cost spillover*), kesenjangan sosial, keresahan sosial, pergeseran nilai-nilai sosial.

7. Prevalensi bencana yang bersumber pada kondisi geografik, geologik, dan geofisik Indonesia; demikian pula pada mentalita masyarakat (fatalisme, keteledoran, kekurangwaspadaan, dan kesiapsiagaan)
8. Masalah kemiskinan, yang menyangkut bukan semata-mata penguasaan *asset*/sumber penghasilan dan tingkat penghasilan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, melainkan juga menyangkut mentalita seperti kepasrahan, ketergantungan, dan ketidakberdayaan yang bersumber pada budaya kemiskinan.

Kondisi tersebut di atas diperburuk dengan sikap masyarakat Indonesia yang sangat mudah menerima rembesan dari luar, dan mengubah dirinya demi menyesuaikan diri dengan rembesan tersebut (adaptasi). Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat adaptif, bahkan dalam beberapa hal sangat mudah meniru (adapitif); apa yang ada di negara lain, langsung diterapkan. Kondisi ini ditambah lagi dengan 'pemaksaan' (*push factor*) dari negara-negara lain yang posisinya dan kondisinya lebih kuat; yang memandang Indonesia dengan luas

wilayah dan besarnya jumlah penduduk sebagai pasar yang bagus untuk segala produk mereka, mulai dari barang sampai ide dan nilai-nilai (Budhi Wibhawa, 2010)⁴. Politik luar negeri tidak lain hanya sekedar upaya untuk membuka pasar, mencari (mencuri) teknologi, dan menggali sumber dana (modal). Kondisi ini diperkuat dengan keinginan Indonesia untuk segera mensejajarkan diri dengan negara-negara maju lainnya. Konsekuensinya, terjadilah perubahan yang lebih tidak terkontrol, sebagaimana disinyalir oleh To Thi Anh (1984:97)⁵, masyarakat negara-negara berkembang "...lebih mudah meniru Barat daripada menemukan cara sendiri". Gagasan serupa dikemukakan oleh Aritonang (1999) yang ternyata sesuai dengan kondisi saat ini, bahwa Indonesia bukanlah negara agraris, bukan pula negara industri...; melainkan negara pasar produk agraris dan industri.⁶

Dalam dunia yang selalu berubah (bahkan sangat cepat), masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan yang cepat, namun sayangnya selalu banyak menerima 'kekalahan' dalam difusi kebudayaan tersebut. Bertahun-tahun lamanya masyarakat Indonesia berada dalam kondisi tersebut, dua hingga tiga generasi berlangsung demikian. Keterulangan dari keterpurukan tersebut

itulah, meminjam istilah Giddens (2010)⁷ dengan terstruktur, terjadi dalam ruang dan waktu yang terus-menerus sehingga memunculkan aturan dan sumber daya tersendiri. Aturan dan sumber daya yang belum tentu dalam penguasaan secara penuh masyarakat (pemerintah) Indonesia. Indonesia seperti kehilangan jati dirinya (*nation character*) sebagai bangsa Indonesia.

Dengan posisinya tersebut, tidak mengherankan jika masyarakat Indonesia penuh dengan masalah sosial baik yang ada di masyarakat maju (perkotaan) maupun yang ada di masyarakat yang tidak maju-maju (perdesaan). Tidak mengherankan pula apabila dikatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat sakit (*the sickness society*)⁸.

Masalah sosial dan kebutuhan sosial yang muncul akibat perubahan sosial yang sedemikian cepat, tidak dapat direspon dengan cepat, jikapun ada tanggapan terlalu kecil dan terlalu lemah. Dibutuhkan orang-orang yang kreatif dan inovatif untuk memunculkan dan menerapkan gagasan-gagasan pelayanan sosial yang membuat masyarakat adaptif terhadap perubahan sosial.

Masyarakat?, masyarakat sampai saat ini tampaknya sudah sangat produktif menciptakan masalah sosial; namun belum cukup terlihat dan meluas kesadaran

⁴ Ibid., hal:17

⁵ To Thi Anh, (1984). Kabudayaan Barat dan Timur, Harmoni atau Konflik. Gramedia: Jakarta

⁶ Ibid., Budi Wibhawa dkk., hal. 15

⁷ Anthony Giddens, 2010. Teori Strukturalisasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Terjemahan, Maufur & Daryatno. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

⁸ Budhi Wibhawa, dkk. (hal:17)

masyarakat untuk berupaya menanganinya secara mandiri. Kata "sosial" lebih berkesan kental dengan keharusan memberi, padahal manusia cenderung lebih ingin 'diberi'; akibatnya kegiatan yang berjudul sosial menjadi tidak populer. Apalagi banyak diantara masalah sosial itu 'enak', sehingga cenderung semakin banyak pelaku, sekaligus korbannya. Bahkan masalah sosial cenderung menjadi 'komoditas' yang menjadi tumpuan penghidupan banyak orang, artinya banyak orang hidup justru dari masalah sosial. Di sana sini, dalam berbagai masalah, memang tampak berbagai upaya namun bersifat parsial dari warga masyarakat, tetapi itu pun masih amat sangat terlalu kecil dibandingkan dengan percepatan pertumbuhan masalah. Dengan demikian, 'boro-boro' melakukan upaya mengatasi masalah, memikirkannya untuk mendapatkan ide pemecahan saja 'ogah'.⁹

Semangat kebangsaan di semua lapisan masyarakat Indonesia menjadi *urgent* untuk terus ditumbuhkan secara sinergis dan merata. Diperlukan manusia yang berkarakter yang kuat sebagai bangsa Indonesia yang disiplin, jujur, tegas dan berani; yang menjadi teladan di lingkungannya.

Banyak persoalan karakter kebangsaan saat ini sesungguhnya bermula dari pendidikan (sosialisasi) dalam lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Ketidak jujur, ketidakdisiplinan, ketidakpatuhan, kurangnya saling hormat menghormati; semuanya dimulai dari institusi keluarga. Terkadang

para orang tua secara tidak sadar menularkan kebiasaan, perilaku, dan ucapan yang tanpa didasari diteladani oleh anak-anaknya. Ketidakpatuhan terhadap lalu lintas dari orang tua saat berkendara membawa serta keluarga, secara tidak langsung memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk bertindak tidak patuh pula.

Sebagai contoh kasus lainnya, coba amati saat kita berkendara. Banyak sekali orang yang baru dapat 'menyetir', tetapi belum tentu dapat 'berkendaraan' dengan baik. Mentalitas para pengendara, adalah seperti orang yang sedang berbelanja di pasar tradisional. Seorang pengendara motor bisa belok dengan tiba-tiba, ke kiri atau ke kanan; bahkan memotong jalur (hak jalan) orang lain, tanpa memberi isyarat kepada pengendara di belakangnya atau di dekatnya. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, banyak pengendara motor atau mobil mengambil arah yang berlawanan dengan pengendara lain. Akibatnya bisa fatal, kecelakaan yang merengut nyawa. Dalam beberapa kasus, bahkan sudah sering terjadi, para pengendara motor melaju di trotoar, dengan alasan macet atau ingin cepat sampai di tujuan. Padahal trotoar adalah haknya para pejalan kaki. Para pengendara motor telah merampas hak para pejalan kaki. Artinya, bahwa sesungguhnya mentalitas korup sudah berjalan dan terjadi dihadapi kita dengan nyata. Secara terstruktur korupsi telah ada dalam kehidupan keseharian di jalanan, jelas terlihat di depan mata, tetapi tanpa mampu berbuat banyak untuk

⁹ Budhi Wibhawa, dkk. Ibid (hal:17)

mengatasinya. Situasi tersebut diperburuk dengan kurang tegasnya penegakkan aturan berlalu lintas dan minimnya sarana prasarana jalan yang layak. Suatu tindakan perampasan hak-hak orang lain yang berlangsung tanpa disadari. Perilaku korup bukan saja terjadi pada para pejabat baik pemerintahan maupun BUMN, yang sering terdengar dan terlihat melalui berbagai media massa.

C. Keteladanan, Ketegasan dan Kejujuran: Suatu Pendekatan *Nation and Character Building*

Bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki daya ketahanan sosial (*social resilience*) yang luar biasa. Lebih dari 350 tahun bangsa (rakyat) Indonesia dijajah Belanda (VOC), dan dilanjutkan 3,5 tahun penjajahan yang kejam oleh Jepang; rakyat/masyarakat Indonesia masih tetap bertahan. Indonesia sudah 70 tahun merdeka, makna merdeka adalah berdaulat atas bumi, air dan udara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah setelah 70 tahun Indonesia merdeka, bangsa Indonesia sudah benar-benar ‘berdaulat’? Jangan-jangan masyarakat Indonesia masih dalam masa ‘penjajahan’ dengan gaya baru. Tentu isu ini dapat memancing diskusi yang panjang. Tetapi sebagai indikasi saja, setelah 70 tahun Indonesia merdeka, masyarakat lapis menengah ke bawah cenderung berjalan memenuhi kebutuhan hidupnya sendirinya (*auto pilot*) tanpa campur tangan pemerintah

sama sekali. Sehingga masyarakat menjadi apatis. Ini sangat berbahaya terutama dalam upaya *nation and character building*.

Masyarakat Indonesia sesungguhnya sangat mendambakan kepemimpinan yang tegas dan jujur, yang memberi teladan yang baik; satunya kata dengan perbuatan; pada setiap lapisan masyarakat. Bukan para pemimpin yang ‘palsu’, hanya terlihat baik, tegas, jujur dan sederhana ketika disorot media; tetapi para pemimpin yang konsisten antara kehidupan pribadi dengan kehidupan publik. Bukan pemimpin *karbitan* yang tercipta melalui karena popularitas media sosial.

Pemimpin yang memiliki keteladanan yang baik menjadi sangat ‘langka’ dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Sementara pemimpin dengan keteladanan yang baik bukanlah muncul dengan tiba-tiba, tidaklah diciptakan dengan mudah, tetapi melalui perjalanan pengalaman hidup yang panjang. Dari sejak dia lahir, melalui sosialisasi yang baik dalam keluarga yang baik, kemudian meluas ke dalam lingkungan sekitar, dalam kelompok yang baik, dalam masyarakat yang baik, serta dalam pemerintahan yang baik.

Pemimpin yang memiliki ketegasan (*assertive*), berani berkata benar manakala hal tersebut adalah benar. Berani menyatakan salah manakala hal itu salah. Terpilihnya presiden dan wakil presiden Indonesia yang baru, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (di tahun 2014) memberi harapan baru bagi bangsa Indonesia. Keberpihakan pemerintah Jokowi-

JK kepada masyarakat bawah yang merupakan visi dan niat serta *mainstream* pembangunan yang menjadi modal politik yang sangat baik, apabila hal tersebut benar-benar dapat diwujudkan. Hal tersebut tentunya seiring dan sesuai dengan amanah dari isi Pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke 4 (empat) yaitu :”....yang **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...**”.

Atas dasar pemikiran tersebut, terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial, diantaranya:

1. Menginventarisasi dan melakukan koordinasi secara terpadu (terintegrasi) berbagai kebijakan sosial, program dan proyek penanganan masalah sosial di berbagai kementerian, yang tidak saja kementerian sosial. Hal ini penting agar kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial (masyarakat) lebih fokus; serta tercipta tanggung jawab yang jelas akan setiap kebijakan, program dan proyek yang ditanganinya. Sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi atas setiap kegiatan yang dilakukan.

2. Memformulasi suatu kebijakan penanganan masalah sosial dan kesejahteraan sosial yang lebih otonom dan partisipatif pada tingkat desa, agar penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial/masyarakat lebih dekat dan mudah tercapai. Tentunya kebijakan tersebut memerlukan pengawasan dan monitoring yang memberdayakan, memudahkan dan fasilitatif.
3. Konsekuensi dari kebijakan pembangunan yang **pro rakyat** tersebut adalah perlunya peningkatan dan penambahan jumlah sumber daya manusia yang profesional (secara ilmu, metode/keterampilan, dan sikap/moral) dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan penanganan masalah-masalah sosial/kesejahteraan sosial, melalui sekolah-sekolah dan pendidikan tinggi (universitas)
4. Meningkatkan dan memperkuat kapasitas dan kerjasama organisasi-organisasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial, seperti Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI), Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), serta organisasi-organisasi terkait lainnya.

5. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara Indonesia menuntut penanganan masalah kesejahteraan sosial yang tidak lagi dapat ditangani secara tradisional dan konvensional, yang hanya ditangani ketika masalah sosial tersebut muncul ke permukaan dan bersifat rehabilitatif dan kuratif saja. Tetapi juga perlu dikembangkan pola-pola penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial yang lebih kreatif, inovatif dan partisipatif (dalam arti yang sesungguhnya); yaitu melalui pengembangan jiwa 'kewirausahaan sosial' (*social entrepreneurship*) sehingga akan tercipta badan-badan sosial (*social enterprise*) yang menjadi wadah aktifitas dan sarana peningkatan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (*community based*).

Namun demikian kesemua hal tersebut di atas akan dapat terwujud manakala telah tumbuh dan berkembangnya rasa kebangsaan yang kuat (kemandirian, demokrasi, persatuan nasional, bangsa yang bermartabat) di berbagai lapisan sosial masyarakat. mulai dari masyarakat terkecil (keluarga) hingga masyarakat yang luas, serta mulai dari pemerintah tingkat lokal hingga pemerintah nasional. Syaratnya, adalah keteladanan kepemimpinan yang baik dari pusat hingga lokal/daerah harus dapat diterapkan secara

konsisten, sehingga akan memperkuat rasa kebangsaan dan pembangunan karakter semua lapisan masyarakat Indonesia. Usaha yang tiada henti dan sabar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan keteladanan tersebut.

D. Strategi Keteladanan (Kepemimpinan)

Upaya membangun karakter bangsa juga dapat dimulai dari lingkungan terkecil dan terdekat yaitu keluarga. Dari keluargalah semua bermula, sosialisasi pertama dilakukan melalui orang tua kepada anak-anaknya. Melalui keluargalah pembentukan karakter dibentuk dan terpelihara, anak-anak akan mencontoh dan meneladani dari para orang tuanya. Jika orang tua mereka memberi contoh yang baik secara konsisten baik ucapan, perilaku dan tindakan dalam keseharian, maka anak akan mengikuti dan meneladani apa yang dilakukan orang tuanya dengan rasa hormat. Tetapi sebaliknya, jika orang memerintahkan anaknya untuk bertindak disiplin dan berbuat baik, sementara ia bertindak sebaliknya, maka anak mungkin menurut jika di hadapan orang tuanya saja. Jangan-jangan mentalitas korupsi berasal dari sosialisasi dalam keluarga, yang mungkin tidak disadari oleh para orang tua. Dengan demikian keteladanan dalam keluarga merupakan proses yang panjang dan harus secara konsisten diterapkan dalam kehidupan keseharian, sebagai bagian dari upaya membentuk karakter kebangsaan generasi yang akan datang.

Selanjutnya sosialisasi secara meluas pada lingkungan yang lebih besar lagi, seperti lingkungan ketetanggaan, sekolah, lingkungan kerja, lingkungan umum, pasar, toko, pom bensin, dan seterusnya. Sosialisasi keteladanan kebangsaan bergerak secara sentrifugal meluas. Gerakan membangun rasa kebangsaan dan membangun karakter bukanlah semudah membalikan telapak tangan, tetapi melalui suatu proses yang panjang dan konsisten tanpa kenal lelah. Sebagian besar ahli psikologi bersepakat bahwa perubahan karakter manusia tidaklah dapat diubah dalam waktu sesaat, tetapi merupakan hasil dan proses berulang yang panjang, dapat dimulai dari semenjak dia lahir hingga dewasa. Dengan demikian diperlukan proses penumbuhan dan pengembangan yang sabar tanpa lelah, serta penguatan secara konsisten (terus-menerus) berulang dari lingkungan terdekat dan lingkungan sekitarnya, serta lingkungan lebih luas lagi. Demikian pula ketika membangun karakter bangsa, yang juga merupakan hasil dan proses sosialisasi yang tiada henti.

Menurut Midgley (1995)¹⁰ upaya perubahan sosial melalui pembangunan sosial dapat dilakukan melalui tiga strategi, yaitu melalui individu, melalui komunitas, dan oleh pemerintah. Lebih jauh Kirs-Ashman & Hull

(2002)¹¹ menyebutkan upaya perubahan dapat dilakukan melalui ranah mikro (individu dan keluarga), meso (kelompok), dan makro (masyarakat). Trimanto (2011)¹² menyebutkan bahwa dalam pendidikan karakter terdapat tiga tahap yang harus dilakukan, yaitu melalui *personal character building* (keimanan, keyakinan, kejujuran, kerja keras, dan kemandirian), *community character building* (saling menghormati dan menghargai, sikap toleransi, saling kerjasama dan tolong menolong) dan *nation character building* (jiwa persatuan, dan merasa senasib dan sepenanggungan).

Ki Hajar Dewantoro telah menyatakan bagaimana seharusnya setiap diri kita masing-masing sebagai orang Indonesia menjadi pemimpin melalui ungkapan *ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tut wuri handayani*, yang artinya

1. *Ing ngarso sung tulodo*, artinya seorang pemimpin, kalau berada di depan harus mampu memberikan contoh yang baik, suri tauladan kepada bagi anak buahnya, kata kuncinya adalah memberi teladan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa keteladanan menjadi barang langka di negeri ini.

¹⁰ Midgley, James. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. Sage Publications: London.

¹¹ Kirs-Ashman, K.K & Hull, Grafton H, Jr (2002). *Understanding Generational Practice*. Brool/Cole : California.

¹² Trimanto (2011). *Character Building: Modal Dasar Nation Building*. Dalam Kompasiana, diunduh tanggal 6 September 2014 melalui <http://edukasi.kompasiana.com/2011/11/13/character-building-modal-dasar-nation-building-409849.html>

Sudah terlalu banyak para pemimpin di Indonesia yang terbilat atau terbukti melakukan tindakan melanggar norma dan hukum, seperti tindak korupsi para menteri, gubernur, walikota/bupati; anggota DPR RI dan DPRD, dan pimpinan lembaga nasional lainnya. Keteladanan menjadi sesuatu yang didambakan masyarakat Indonesia atas pemimpin mereka.

2. *Ing madya mangun karsa*, apabila berada di tengah harus mampu membangkitkan motivasi dan inovasi, karya-karya nyata yang dapat membangkit semangat kebangsaan. Ciptakan dan hargai karya-karya kreatif dan inovatif yang dapat menunjang semangat kebangsaan Indonesia di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan produk dalam negeri.
3. *Tut wuri handayani*. Beri dukungan baik moral dan material dari belakang, sehingga tercipta peluang-peluang yang memudahkan bawahan atau generasi penerus bangsa untuk siap menerima estafet kepemimpinan.

Ketiga hal tersebut bukanlah bagian yang saling terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Setiap diri kita adalah pemimpin yang pada waktu dan saat tertentu dapat berada di depan, di tengah atau di belakang yang dipimpin.

Penutup

Keteladanan kepemimpinan merupakan kata kunci penting dalam membangun rasa kebangsaan Indonesia dan karakter manusia yang unggul. Sebab, hampir segala sumber daya (sumber daya alam, sumber daya manusia) yang menjadi syarat untuk menjadi negara unggul / maju yang mampu mensejahterakan masyarakatnya sesungguhnya telah tersedia di Indonesia. Rendah dan lemahnya *nation and character building*-lah yang mengakibatkan segala sumber daya tersebut tidak termanfaatkan secara maksimal, bahkan lebih banyak dinikmati oleh sekelompok orang saja, juga bangsa-bangsa asing.

Pembangunan kesejahteraan sosial untuk seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia hanya mungkin dapat diwujudkan jika kemandirian, kedaulatan rakyat, demokrasi, dan persatuan nasional juga ditumbuhkembangkan seiring proses pembangunan tersebut. Proses penumbuhkembangan *nation and character* sebagai bangsa Indonesia seharusnya juga merupakan salah satu sasaran dari pembangunan nasional. Sehingga Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa bermartabat di mata dunia internasional, seiring dengan proses kepemimpinan dan keteladanan yang amanah, konsisten dan merakyat.

Menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia dan pembangunan karakter dan mental kebangsaan dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Melalui

keluargalah, sebagai lingkungan pertama dan paling utama dalam meletakkan pondasi yang kuat bagi pembangunan karakter dan mental kebangsaan ditumbuhkan. Keluarga merupakan institusi penting, yang sudah mulai terabaikan dalam kehidupan modern masyarakat Indonesia. Hampir semua masalah sosial berasal dari penanaman nilai-nilai (sosialisasi) yang terabaikan dalam keluarga. Kembalilah ke keluarga (*back to family*) untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan karakter manusia Indonesia yang kuat, yang ditunjang dengan konsistensi keteladanan kepemimpinan yang jujur, tegas, adil dan amanah di lingkungan sekitar: ketetanggaan, sekolah, kantor dan wilayah publik lainnya. Sehingga ‘korupsi struktural’ yang pada akhirnya menciptakan ‘kemiskinan struktural’ akan dapat dihindari. Pada akhirnya, upaya pencapaian kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang adil akan segera tercapai. *Insha Allah, wallahuallam bisyawab.*

Bahan Pustaka:

- Anh, To Thi (1984). *Kabudayaan Barat dan Timur, Harmoni atau Konflik*. Gramedia: Jakarta
- Gidden, Anthony. 2010. *Teori Strukturalisasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Terjemahan, Maufur & Daryatno. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Midgley, James. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. Sage Publications: London.
- Kirst-Ashman, K.K & Hull, Grafton H, Jr (2002). *Understanding Generaslist Practice*. Brool/Cole : California.
- Otho H. Hadi, Staf Direktorat Politik, Komunikasi, dan Informasi Bappenas, dalam tulisannya tentang *Nation and Character Building melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan*.
- Trimanto (2011). *Character Building: Modal Dasar Nation Building*. Dalam Kompasiana, diunduh tanggal 6 September 2014 melalui <http://edukasi.kompasiana.com/2011/11/13/character-building-modal-dasar-nation-building-409849.html>
- Wibhawa, Budhi dkk (2010, 2015). *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. Widya Padjadjaran:Bandung